

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, dkk, 2015, *Meninjau Kebijakan Kriminalisasi dalam RUU-KUHP 2015*, ICJR, Jakarta.
- Ghofar, Abdul, 2009, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dan Delapan Negara*, Kencana, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2010, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S. 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Husak, Douglas, 2008, *Criminalization: The Limits of Criminal Law*, Oxford University Press, New York.
- Luthan, Salman, 2014, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Manan, Bagir, 2006, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J., 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhadjir, Noeng, 1996, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Prasetyo, Teguh, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.

\_\_\_\_\_, dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Huku Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Rauf, Maswadi, Dkk, 2009, *Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.

Syamsudin, M., 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Wiyanto, Roni, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Zaidan, M. Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Jurnal**

Anangkota, Muliadi, "Klasifikasi Sistem Pemerintahan: Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2017.

Azhari, Faisol, "The Application of Law, Going to the Law Enforcement (An Analyzing of the riil Scientific)", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. V, No. 2, April- Agustus 2018.

Bendor, Ariel L. and Hadar Dancig Rosenberg, "Unconstitutional Criminalization", *New Criminal Law Review*, May 2016.

- Druzin, Bryan H. & Jessica Li, "Criminalization of Lying Under What Circumstances, If Any, Should Lies be Made Criminal?", *The Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 101, No. 2, 2011.
- Melander, Sakari, "Criminalization and Its Limitation: The Finnish Perspective", *Peking Law University Journal*, Vol. 5, Issue 1, 2017.
- Najih, Mokhammad, "Indonesian Penal Policy: Toward Indonesia Criminal Law Reform Based on Pancasila", *Journal of Indonesian Legal Studies*, Volume 3, Issue 02, November 2018.
- Rosana, Ellya, "Hukum dan Perkembangan Masyarakat", *Jurnal TAPIS*, Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2013.
- Saraswati, Retno, "Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41, No.1, Januari 2012.
- Suryani, Lidya, "Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden: Perlukah diatur kembali dalam KUHP?", *Negara Hukum*, Vol. 8, No. 2, November 2017.
- Toelle, Marten H., "Kriminalisasi Berlebih (Overcriminalization) dalam Kriminalisasi Korupsi", *Refleksi Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2015
- Wicaksono, Aditya Septian, dkk, Kebijakan Hukum Pidana terhadap Formulasi perbuatan pencemaran Nama Baik Presiden sebagai Perlindungan simbol negara," *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, tahun 2016.
- Yusa, I Gede dan Bagus Hermanto, , "Cerminan Penegasan dan Penguatan Sistem Presidensiil Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3, September 2017.

### **C. Laporan Penelitian**

- Lambang, Adhya Satya, 2009, *Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden*, Thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Pramana, Hanindito Himawan, 2017, *Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi 013-022/PUU-IX/2006*, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Tim Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2005, *Laporan Akhir Tim Analisa dan Evaluasi Hukum Delik-Delik Penghinaan terhadap Pejabat Simbol-Simbol Negara*, BPHN, Jakarta.

#### **D. Internet**

Arrazie, Harits Naufal dan Hanif Janitra Satriawan, “Eddy Hiariej: RKUHP Sangat disesuaikan dengan Kondisi Masyarakat”, [http://www.balairungpress.com/2018/03/eddy-hiariej-rkuhp-sangat disesuaikan dengan-kondisi-masyarakat/](http://www.balairungpress.com/2018/03/eddy-hiariej-rkuhp-sangat-disesuaikan-dengan-kondisi-masyarakat/), diakses pada 23 Desember 2019.

Astuti, Nur Azizah Rizki, “Panja RUU KUHP: Pasal Penghinaan Presiden Selesai, Disahkan Pekan Depan”, <https://news.detik.com/berita/d-4707967/panja-ruu-kuhp-pasal-penghinaan-presiden-selesai-disahkan-pekan-depan>, diakses pada 22 September 2019.

Firman, Tony, “Ancaman Kriminalisasi Kritik oleh Pasal Penghinaan Kepala Negara”, <https://tirto.id/ancaman-kriminalisasi-kritik-oleh-pasal-penghinaan-kepala-negara-cEbY>, diakses pada 28 Agustus 2019.

Hidayat, Rofiq, “Alasan Pemerintah Adopsi Pasal Penghinaan Presiden dalam RUU-KUHP”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7971580ae48/alasan-pemerintah-adopsi-pasal-penghinaan-presiden-dalam-RUU-KUHP/>, diakses pada 1 September 2019.

Rahman, Zaqiu, “Wacana Pasal Penghinaan Presiden atau Wakil Presiden dalam RUU KUHP”, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/Wacana%20PASAL%20PENGHINAAN%20PRESIDEN%20DALAM%20RUU%20KUHP%](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Wacana%20PASAL%20PENGHINAAN%20PRESIDEN%20DALAM%20RUU%20KUHP%20), diakses pada 30 Agustus 2018.

Stefanie, Christie, “Pemerintah Tegaskan Pentingnya Pasal Penghinaan Presiden”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180206143613-12-274242/pemerintah-tegaskan-pentingnya-pasal-penghinaan-presiden>, diakses 1 September 2019.

#### **E. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

#### **F. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **G. Lainnya**

Tim Perumus RUU-KUHP, 2019, *Naskah Akademik RUU-KUHP*, BPHN, Jakarta.